

Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Indonesia di Pasar Internasional Sebagai Upaya Mendukung Tercapainya Pembangunan Nasional

Anita Asnawi

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi
Univesitas Dr. Soetomo Surabaya
e-mail anita.asnaw@gmail.com

ABSTRAK

Visi dan impian Indonesia 2015-2085 dituangkan dalam gagasan Nawa Cita dalam rangka menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satu dari sembilan program Nawa Cita pada agenda keenam adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Penting kiranya bagi Pemerintah untuk mengenali dan memahami posisi daya saing negara Indonesia di antara negara-negara lain di dunia, terutama diantara negara ASEAN dalam menyambut era MEE, sehingga akan memberikan wawasan yang lebih luas dan landasan yang tepat dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mampu menjadi daya ungkit demi tercapainya cita-cita nasional tersebut. Posisi daya saing negara dapat dilihat dari pemeringkatan yang setiap tahun telah dilakukan oleh *International Management Development* (IMD) dan *World Economic Forum* (WEF) dengan berbagai indikator pilar-pilar ekonomi.

Kata Kunci : Produktivitas Rakyat, Daya Saing Indonesia, IMD, WEF, Nawacita, Trisakti.

People's Productivity and Indonesia Competitiveness in the International Market as a National Development Supporting Effort

ABSTRACT

The vision of Indonesia 2015-2085 is embodied in the idea of Nawa Cita in order to give the priority of the path of change towards a sovereign Indonesia, in the field of economy and culture politically and independently. One of Nawa Cita's nine programs on the sixth agenda is to increase people's productivity and competitiveness in international markets so that Indonesia can move forward and rise with other Asian nations. It is important for the Government to recognize and understand the position of Indonesia's competitiveness among other countries in the world, especially among ASEAN countries in welcoming the EEC era, thereby providing greater insight and appropriate ground in designing and implementing policies able to become a leverage for the achievement of these national ideals. The position of the country's competitiveness is provided by the International Management Development (IMD) and the World Economic Forum (WEF) with various indicators of economic pillars annually.

Keywords : *People's Productivity, Competitiveness, Indonesia's Competitiveness, IMD, WEF, Nawacita, Trisakti.*

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berfungsi sebagai pedoman Kementrian/Lembaga (KL) dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan, dan menjadi bahan pertimbangan dan penyesuaian bagi RKP maupun RPJM Daerah. Sebagai acuan dasar dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RPJMN sarat dengan muatan agenda strategis dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu sendiri merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Indonesia (NKRI), yang dilaksanakan melalui jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945, serta prinsip dasar Trisakti. Trisakti memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berangkat dari Visi dan Impian Indonesia 2015-2085, diiringi dengan gagasan Nawa Cita dalam rangka menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satu dari sembilan program Nawa Cita pada agenda keenam adalah: Meningkatkan **produktivitas rakyat dan daya saing** di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Hal ini mengiringi prinsip dasar yang kedua dari Trisakti, yaitu **berdikari** dalam bidang ekonomi, yang diwujudkan dalam pembangunan **demokrasi ekonomi** yang menempatkan **rakyat sebagai pemegang kedaulatan** di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. (KPPN/Bapenas, 2014)

Bangsa yang berdikari tercermin antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas, dan harapan hidup yang tinggi. (KPPN/Bapenas, 2014).

Upaya mewujudkan cita-cita tersebut bukanlah tanpa hambatan. Ada tiga masalah pokok bangsa, yakni (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. (KPPN/Bapenas, 2014). Permasalahan kedua yaitu melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional menjadi titik tolak usulan ini sebagai bahan masukan dalam rancangan pembangunan nasional jangka menengah, dengan adanya pertimbangan bahwa kelemahan tersebut membawa dampak terhadap kurang kuatnya daya saing Indonesia di pasar Internasional yang akhirnya dapat memper lambat tercapainya kemajuan pembangunan nasional.

B. PEMBAHASAN

1. Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Indonesia

1.1. Perekonomian Global

Perkembangan perekonomian global pada tahun 2016 melambat 0,2 persen pada

posisi 3,2 persen dibandingkan pada tahun 2015. Hal ini juga tercermin dari stagnansi pertumbuhan volume perdagangan internasional, yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara utama, seperti: AS, kawasan Eropa, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Jepang. Di tahun 2017, perekonomian global diperkirakan akan tumbuh lebih baik, dengan laju sebesar 3,5 persen yang digerakkan oleh negara-negara berkembang yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,6 persen, lebih baik dari tahun 2016 yang hanya mencapai 4,3 persen. Perbaikan aktivitas perekonomian global ini diperkirakan akan mendorong peningkatan volume perdagangan dunia, sehingga volume perdagangan dunia diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global, yaitu sekitar 4,0 persen di tahun 2017 (World Economic Forum (WEF), 2016).

Pada wilayah Asia Timur dan Pasifik yang ditandai oleh keragaman yang besar, meliputi 18 negara bagian yang tercakup dalam GCI 2016-2017 dengan tiga dari 10 ekonomi terbesar di dunia, yaitu: China, Jepang, dan Indonesia. Negara-negara berkembang di kawasan ini, yang dipimpin oleh China, telah mendukung pemulihan global yang sederhana sejak krisis keuangan global. Perekonomian ini menyumbang hampir dua per lima pertumbuhan global tahun lalu, lebih dari dua kali lipat kontribusi gabungan dari semua

wilayah lainnya. (Republik Indonesia (RI), 2017).

Menjadi hal yang kontras ketika di wilayah perekonomian Asia Timur dan Pasifik posisi Indonesia yang termasuk dalam tiga negara dengan ekonomi besar – bersama dengan China dan Jepang – harus menduduki peringkat daya saing ke-36 menurut GCI dan ranking 42 menurut WCY dari keseluruhan negara yang berada dalam masing-masing indeks tersebut di tahun 2017. Beberapa hal yang menjadi faktor-faktor kelemahan daya saing akan dipaparkan kemudian.

1.2 Perekonomian Domestik dan Produktivitas Rakyat

Sejalan dengan pemulihan perekonomian global yang masih terbatas, pertumbuhan ekonomi domestik terlihat ada perbaikan menjadi 5,0 persen pada tahun 2016, dari sebelumnya sebesar 4,9 persen di tahun 2015. Kenaikan pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil dan perbaikan kinerja ekspor. Inflasi yang rendah dan stabil mampu menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tingkat 5,0 persen. Secara riil, ekspor mengalami kontraksi sebesar 1,7 persen, tetapi penurunan ekspor tidak sedalam tahun sebelumnya sebesar 2,1 persen. Berikut disajikan data pertumbuhan PDB, seperti tampak pada tabel 1.

Tabel 1
Pertumbuhan PDB dari Sisi Permintaan
2015-2017 (%)

Uraian	2015	2016	2017 Realisasi Triwulan I
Pertumbuhan PDB	4,9	5,0	5,0
Konsumsi rumah tangga	5,0	5,0	4,9
Konsumsi Pemerintah	5,3	(0,1)	2,7
Investasi (PMTB)	5,0	4,5	4,8
Ekspor barang dan jasa	(2,1)	(1,7)	8,0
Impor barang dan jasa	(6,4)	(2,3)	5,0

Sumber : BPS

Dari data diatas, bisa di lihat bahwa sementara konsumsi rumah tangga stagnan namun sebaliknya kegiatan investasi mengalami penurunan.

Menurut data BPS, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2017 mencapai Rp3 366,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2 472,8 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2017 terhadap triwulan II-2016 tumbuh 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 10,88 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 8,49 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2017 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 4,00 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,44 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran

dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang meningkat signifikan sebesar 29,37 persen.

Ekonomi Indonesia semester I-2017 (c-to-c) tumbuh 5,01 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha kecuali Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami penurunan sebesar 0,50 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 8,27 persen.

Selain indikator perekonomian diatas, di sisi lain tersedia satu faktor yang menguntungkan Indonesia dengan adanya bonus demografi yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja, yang tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2011 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028 dan 2031 (KPPN/Bapenas, 2014).

Tabel 2
Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 – 2025

	2015	2020	2025
Penduduk usia 0 -14, juta	69,9	70,7	70
Usia Kerja(15-64 th), juta	171,9	183,5	193,5
Penduduk Lansia (60+), juta	21,7	27,1	33,7
Jumlah total, juta	255,5	271,1	284,8
Penduduk di perkotaan (%)	53,3	56,7	60,0
Rasio ketergantungan (%)	48,6	47,7	7,2

Sumber : RPJMN 2015-2019

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah usia produktif hingga tahun 2025 diproyeksikan meningkat, hal sebaliknya terjadi pada rasio ketergantungan yang diproyeksikan mengalami penurunan. Dengan demikian, bonus demografi ini memberikan kontribusi terhadap keunggulan daya saing pada angkatan kerja.

Di luar penjelasan makroekonomi di atas, masih terdapat pelbagai penjelasan *institutional economics* yang dapat menjelaskan fenomena lambatnya proses pemulihan ekonomi ini. Fenomena reformasi ekonomi di negara berkembang tampaknya berbeda dengan yang terjadi di negara maju. Di negara berkembang, reformasi biasanya terjadi bersamaan dengan krisis ekonomi. Sebaliknya di negara-negara maju, reformasi ekonomi dilakukan pada saat perekonomian beradadalam siklus bisnis yang menanjak (Ikhsan, 1999).

1.3. Daya Saing Indonesia

Pelaksanaan pembangunan nasional secara umum ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran suatu negara, akan dapat dicapai dengan mengenali berbagai faktor yang menjadi kekuatan daya saingnya di kancah dunia yang tak lagi mengenal batasan, diantaranya yang berupa batasan perekonomian, politik, kebudayaan dikenali sebagai globalisasi. Sejalan dengan Nawa Cita keenam, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, penting kiranya bagi Pemerintah untuk mengenali dan memahami posisi daya saing negara Indonesia di antara negara-negara lain di dunia, terutama diantara negara ASEAN dalam menyambut era MEE, sehingga akan memberikan wawasan yang lebih luas dan landasan yang tepat dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mampu menjadi daya ungkit atau sebagai *nudge*, sebagai suatu dorongan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik demi tercapainya cita-cita nasional tersebut.

Pemeringkatan daya saing negara yang setiap tahun telah dilakukan oleh *International Management Development* (IMD) dan *World Economic Forum* (WEF) menjabarkan kondisi negara-negara yang dicirikan oleh kinerja daya

saing yang tinggi mencakup pilar-pilar ekonomi, dengan pola umum yang berfokus pada regulasi yang ramah bisnis, infrastruktur baik fisik maupun non fisik, dukungan institusi inklusif, serta transparansi secara umum.

Pemeringkatan daya saing oleh *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report* (GCI) memberikan analisa berdasarkan dua belas pilar, yaitu: institusi, infrastruktur, lingkungan makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan yang lebih tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, perkembangan pasar uang, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis serta inovasi. Analisis Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index / GCI) menunjukkan tiga tantangan utama dan pelajaran yang relevan untuk kemajuan ekonomi, kolaborasi publik-swasta, dan tindakan kebijakan. Yang pertama, sepuluh tahun setelah krisis, sektor keuangan tetap rentan. Kedua, ada lebih banyak negara yang bisa berinovasi, tapi mereka harus berbuat lebih banyak untuk menyebarkan manfaatnya. Pasar utama yang sedang berkembang seperti China, India, dan Indonesia menjadi pusat inovasi, mengejar ekonomi maju. Namun, mereka akan mendapatkan keuntungan dari mempercepat kemajuan dalam meningkatkan kesiapan orang dan perusahaan mereka untuk mengadopsi teknologi baru, yang diperlukan untuk menyebarkan secara luas manfaat ekonomi dan sosial yang potensial bagi inovasi. Yang ketiga, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan perlindungan pekerja diperlukan untuk memastikan kemakmuran bersama di era Revolusi Industri keempat (WEF, 2017).

Laporan Global Competitiveness Index 2016-2017 diolah oleh WEF dari 138 negara, memperlihatkan adanya beberapa hal yang kontras dalam kinerja Indonesia meskipun telah melaksanakan banyak reformasi terhadap lingkungan bisnisnya, diantaranya adalah: ukuran pasar pada posisi 10, posisi 30 di pilar lingkungan ekonomi makro, dan ranking 31

untuk inovasi. Peforma yang baik pada bidang pengembangan keuangan (ke-42, sebelumnya posisi 49). Namun Indonesia menempati peringkat yang rendah pada posisi 100 dalam pilar kesehatan dan pendidikan dasar (turun 20), dan peringkat 108 di pilar efisiensi pasar tenaga kerja (naik tujuh) sebagai akibat berbagai kekakuan, biaya redundansi yang mahal yang mencapai gaji lebih dari satu tahun (adanya gaji ke-13), dan tingkat partisipasi angkatan kerja rendah perempuan (posisi 115). Selain itu juga menempati peringkat yang rendah pada posisi 91 dalam pilar kesiapan teknologi (turun enam) karena penetrasi TIK tetap rendah - hanya seperlima dari populasi yang menggunakan Internet dan hanya ada satu koneksi broadband untuk setiap 100 orang. Namun, penyerapan teknologi oleh perusahaan lebih meluas (53) (WEF, 2016).

Dengan diberlakukannya *The ASEAN Community* di tahun 2015, di satu sisi peningkatan integrasi ini akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian

nasional, sebaliknya di sisi lain juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Diantara negara berkembang, Indonesia dinilai telah menunjukkan perbaikan kinerja hampir pada semua pilar, mulai dari infrastruktur hingga makro ekonomi, terutama didorong oleh ukuran pasar yang besar dan lingkungan makro ekonomi yang relatif kuat. Meskipun demikian, peringkat daya saing Indonesia pada posisi 36 masih di bawah 3 negara tetangga di ASEAN yaitu Thailand yang menduduki peringkat ke-32, Malaysia pada ranking 23, dan Singapura di posisi 3. Posisi di bawah Indonesia diduduki oleh Vietnam yang berada di posisi 55 dan Philipina di posisi 56 serta Brunei Darussalam di posisi 46. Beberapa faktor yang membuat daya saing Indonesia turun pada tahun lalu, diantaranya adalah korupsi, inefisiensi birokrasi pemerintah, infrastruktur yang terbatas, akses pendanaan, inflasi, ketidakstabilan kebijakan, tingkat pajak dan lainnya (WEF, 2016).

Tabel 3
Daya Saing Indonesia
Global Competitiveness Index 2016-2017 dan 2017-2018

	Ranking Daya Saing									
	Singapura		Malaysia		Thailand		Indonesia		Philipina	
	2016 -2017	2017 -2018	2016 -2017	2017 -2018	2016 -2017	2017 -2018	2016 -2017	2017 -2018	2016 -2017	2017 -2018
Overall Index	2	3	25	23	34	32	41	36	57	56
Basic Requirement	1	2	26	24	44	41	52	46	65	67
1. Institutions	2	2	26	27	84	78	56	47	91	94
2. Infrastructures	2	2	24	22	49	43	60	52	95	97
3. Macro Economics	11	18	35	34	13	9	30	26	20	22
4. Health & primary education	2	3	44	30	86	90	100	94	81	82
Efficiency Enhancers	2	2	24	24	37	35	49	41	58	61
5. Higher education & training	1	1	41	45	62	57	63	64	58	55
6. Goods market & efficiency	1	1	12	20	37	33	58	43	99	103
7. Labor market & efficiency	2	2	24	26	71	65	108	96	86	84

8. Financial market development	2	3	13	16	39	40	42	37	48	52
9. Technology readiness	9	14	43	46	63	61	91	80	83	83
10. Market size	37	35	24	24	18	18	10	9	31	27
Innovation & sophistication factors	12	12	20	21	47	47	32	31	53	61
11. Business sophistication	19	18	20	20	43	42	39	32	52	58
12. Innovation	9	9	22	22	54	50	31	31	62	65

Sumber : Global Competitiveness Report 2016-2017 dan 2017-2018, WEF

Tabel 4
Ranking Daya Saing Indonesia
World Competitiveness Yearbook 2016-2017

	Ranking Daya Saing				
	Singapura	Malaysia	Thailand	Philipina	Indonesia
Overall ranking Tahun 2016	4	19	28	42	48
Overall ranking Tahun 2017	3	24	27	41	42
Government Efficiency	3	25	20	37	30
• Keuangan Publik	5	27	11	25	22
• Kebijakan Perpajakan	16	11	4	18	6
• Kerangka Institusional	2	28	30	41	40
• Business legislation	3	37	38	53	58
• Societal framework	17	37	44	51	48
Kinerja Ekonomi	6	13	10	26	33
• Ekonomi Domestik	15	32	33	12	13
• Perdagangan Internasional	1	26	3	44	56
• Investasi Internasional	7	32	37	47	50
• Ketenagakerjaan	11	16	3	4	13
• Harga	56	3	28	52	34
Efisiensi Bisnis	10	19	25	28	30
• Efisiensi dan Produktivitas	6	22	41	52	53
• Pasar tenaga kerja	11	16	8	5	4
• Finansial	7	21	24	33	38
• Praktek Manajemen	17	15	20	28	29
• Sikap dan Nilai-nilai	6	22	23	18	24
Infrastruktur	7	32	49	54	59
• Infrastruktur dasar	2	16	49	54	59
• Infrastruktur teknologi	1	20	36	42	54
• Infrastruktur ilmiah	12	29	48	57	52
• Kesehatan & lingkungan	25	43	57	49	58
• Pendidikan	5	40	54	59	61

Sumber: World Competitiveness Yearbook 2017, IMD

Serupa dengan Korea, pada periode 2017-2018 (meliputi 137 negara) menurut GCI, Indonesia (ranking 36) telah memperbaiki kinerjanya hampir di semua pilarnya. Posisi di peringkat didorong terutama oleh ukuran pasar yang besar (9) dan lingkungan makro ekonomi yang relatif kuat (ranking 26, membaik dari periode sebelumnya di posisi ke-30), lebih kuat daripada kondisi ekonomi makro di Malaysia (ranking 34), namun masih dibawah Singapura (ranking 18), Thailand (9) dan Philipina (22). Peringkat ke-31 dan ke 32 dalam pilar inovasi dan kecanggihan bisnis masing-masing, Indonesia adalah salah satu inovator teratas di antara negara berkembang, namun masih dibawah Singapura (ranking 9) dan Malaysia (ranking 22). Sebaliknya, negara ini tertinggal cukup jauh dalam hal kesiapan teknologi (ke-80) meski telah membuat kemajuan yang mantap di lini depan selama dekade terakhir, namun tetap merupakan daya saing paling lemah diantara keempat negara lain. Tampak kemajuan signifikan juga dibutuhkan di pilar efisiensi pasar tenaga kerja (ke-96, dari ranking 108 pada periode sebelumnya), yang diakibatkan oleh biaya redundansi yang berlebihan, fleksibilitas penguasaan upah yang terbatas, dan perwakilan perempuan yang terbatas dalam angkatan kerja (WEF, 2017).

Daya saing yang lemah berikutnya adalah pada pilar kesehatan dan pendidikan dasar (ranking 94 dari 100 pada periode sebelumnya), paling lemah diantara keempat negara lainnya.

International Management Development memberikan hasil peringkat dan variabel penilaian yang sedikit berbeda. Faktor penilaian dalam World Competitiveness Ranking Yearbook 2016-2017 (WCY) didasarkan pada empat elemen dasar yaitu *economic performance*, *governance efficiency*, *business efficiency*, dan *infrastructure*, dengan sumber data

berasal dari 63 negara. Hampir serupa dengan peringkat Indonesia pada GCI, pada WCY ranking Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Philipina. (IMD, 2017).

Dapat dilihat dari tabel 4 bahwa daya saing Indonesia hampir secara keseluruhan diantara lima negara ASEAN berada pada posisi paling rendah. Serupa dengan data GCI, kekuatan daya saing Indonesia diperoleh hanya pada indikator pasar tenaga kerja yang menduduki peringkat paling tinggi diantara kelima negara ASEAN, yaitu pada peringkat ke-4. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan elemen efisiensi dan produktivitas (ranking 53), dengan ranking pada pilar efisiensi bisnis di posisi 30. Selain itu, infrastruktur – baik infrastruktur dasar, teknologi, maupun kesehatan dan pendidikan – kesemuanya mendekati ranking 60. Kemudian faktor *business legislation*, perdagangan internasional dan investasi internasional juga membutuhkan perhatian khusus karena berada pada posisi 58, 56, dan 50.

Tidak berlebihan kiranya apabila faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing menjadi prioritas utama dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, sedangkan faktor-faktor yang menjadi kekuatan daya saing akan terus dipertahankan sebagai komponen keunggulan daya saing Indonesia di pasar Internasional. Hal tersebut sejalan dengan salah satu dari sembilan program Nawa Cita dalam upaya meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

1.4.Keunggulan daya saing Indonesia

Beberapa faktor yang menjadi kekuatan daya saing Indonesia yang patut untuk dipertahankan dengan kebijakan yang tepat adalah:

1. Ukuran pasar

Ukuran pasar mempengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan perusahaan mengeksplorasi skala ekonomi. Di era globalisasi, pasar internasional telah menjadi pengganti pasar domestik, terutama bagi negara-negara kecil. Dengan demikian ekspor dapat dianggap sebagai pengganti permintaan domestik dalam menentukan ukuran pasar bagi perusahaan suatu negara. Ukuran pasar Indonesia dianggap memiliki daya saing yang sangat kuat dengan menempati ranking 9 pada index GCI, sangat kontradiktif karena tidak diiringi oleh prosentase ekspor terhadap GDP yang hanya mampu menempatkan posisi Indonesia pada ranking 114, melemah dibandingkan periode sebelumnya pada posisi 111. Hal ini dapat dimaknai bahwa ukuran pasar yang besar belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat.

2. Makro ekonomi yang cukup baik (ranking 26 dari 137 negara), namun tidak diiringi dengan stabilnya inflasi tahunan (ranking 111).

3. Inovasi dianggap memiliki daya saing yang cukup kuat dengan menempati ranking GCI 31. Namun hal tersebut belum didukung oleh aplikasi hak paten dengan ranking 97.

4. Kebijakan perpajakan

Kebijakan perpajakan memperoleh nilai yang tinggi yang artinya dianggap telah diimplementasikan oleh pemerintah dengan baik. Dalam hal ini, seharusnya kebijakan pajak yang baik dapat lebih menggeliatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga menyumbangkan penguatan daya saing negara.

5. Bonus demografi.

Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga

membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerja menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia. Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan yang tepat sebagai upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

1.5. Kelemahan Daya Saing Indonesia

Dari data perekonomian dunia maupun domestik, serta laporan tentang daya saing yang dipaparkan baik oleh WEF dalam GCI maupun oleh IMD dalam WCY, memberikan pandangan kepada kita tentang pilar-pilar atau faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat maupun untuk memperbaiki lemahnya daya saing Indonesia di pasar internasional. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

1. Efisiensi pasar tenaga kerja

Sebagai akibat berbagai kekakuan, biaya redundansi yang mahal yang mencapai gaji lebih dari satu tahun (adanya gaji ke-13) menyebabkan daya saing menempati posisi ke-133, dan tingkat partisipasi angkatan kerja rendah perempuan (posisi 113), dari index daya saing GCI diantara 137 negara.

2. Kesiapan teknologi

Merupakan salah satu faktor yang dianggap masih sangat lemah daya saingnya, yaitu pada peringkat ke-80, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dalam merancang program pembangunan nasional. Beberapa indikator yang dianggap masih lemah menurut indeks GCI periode 2017-

2016 antara lain adalah *internet bandwidth* yang berada pada ranking 90 membaik dari posisi sebelumnya di peringkat ke-112, *fixed-broadband internet subscriptions* pada posisi 103 yang membaik dari posisi 108, dan pengguna internet 109 melemah dari posisi sebelumnya 107.

3. Infrastruktur

Dari indeks WCY, dapat kita lihat daya saing Indonesia pada pilar infrastruktur Indonesia kesemuanya mendekati ranking 60 diantara 63 negara, baik pada infrastruktur dasar, teknologi, maupun kesehatan dan pendidikan. Sedangkan pada index GCI (berdasarkan data dari 137 negara) dipaparkan bahwa infrastruktur yang lemah meliputi kualitas infrastruktur secara keseluruhan (ranking 68, membaik dari ranking 80 pada periode sebelumnya), kualitas jalan (ranking 64, menguat dibandingkan ranking periode sebelumnya di posisi 75), kualitas pelabuhan (ranking 72 dari 75), kualitas ketersediaan tenaga listrik (ranking 86 dari 89), serta jaringan telepon rumah (ranking 104, memburuk daripada periode sebelumnya di peringkat 86). Seperti halnya kesiapan teknologi, daya saing pada infrastruktur ini memberikan peringatan kepada Indonesia bahwa sebaik apapun kinerja makro ekonomi maupun ukuran pasar, hal tersebut akan sia-sia jika tidak diiringi oleh membaiknya pilar-pilar daya saing yang lain seperti kualitas infrastruktur dan kesiapan teknologi.

4. Kesehatan dan pendidikan dasar

Telah disebutkan diatas, bahwa infrastruktur kesehatan dan pendidikan menurut indeks WCY masih menjadi kelemahan daya saing Indonesia. Indeks GCI juga memaparkan hal yang sama, dengan posisi daya saing Indonesia pada ranking 94 dari peringkat 100 pada periode sebelumnya. Salah satu

penyumbang kelemahan terbesar adalah masih banyaknya penderita TBC dampak kegiatan usaha terkait dengan TBC (ranking 131 dan 101 dari 137 negara), dampak kegiatan bisnis terkait dengan HIV/AIDS (ranking 73, menguat dibandingkan ranking 124 pada periode sebelumnya), harapan hidup (ranking 101), serta tingkat partisipasi siswa pada pendidikan dasar (ranking 106).

5. Efisiensi pasar produk

Daya saing terlemah dalam pilar efisiensi pasar produk terletak pada faktor banyaknya prosedur dan waktu yang dibutuhkan dalam memulai suatu kegiatan bisnis (ranking 121 dan 105, menguat daripada periode sebelumnya pada posisi ke-133 dan 126), serta prosentase import terhadap GDP (ranking 129). Hal tersebut tentu saja dapat menghambat kelancaran kegiatan penanaman modal dan perdagangan internasional. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan (*business legislation*) yang dapat mempermudah kelancaran kegiatan usaha atau *ease of doing business*.

6. Pendidikan dan pelatihan pada pendidikan yang lebih tinggi.

Tingkat partisipasi siswa pada pendidikan menengah dan tinggi hanya menduduki posisi ke-85 dan ke-91 dari 137 negara pada indeks GCI.

2. Sasaran Pembangunan Nasional Ditinjau Dari Posisi Daya saing

Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Titik berat peningkatan daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efisien. Peningkatan daya saing perekonomian ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak

menciptakan rente ekonomi maupun ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah di Indonesia.

Negara dapat mempengaruhi kinerja perekonomian melalui penciptaan lingkungan makroekonomi dan mikroekonomi yang stabil dan kondusif untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien. Di samping itu penciptaan lingkungan kelembagaan seperti *property right*, kedamaian, keamanan dan aturan main akan mendorong terciptanya investasi jangka panjang yang efisien. Tiga elemen kelembagaan yang dibutuhkan dan perlu disediakan oleh negara adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Rodrik (2000) menambahkan ketiga elemen di atas dengan dua elemen lain yang tidak kalah penting yaitu tersedianya *social safety net* dan institusi untuk *conflict management*. Studi empiris yang dilakukan Comandor, Davoodi dan Lee (1996) dan Rodrik(2000) menunjukkan bahwa pada negara dengan institusi yang lemah dan *poor policies*, pendapatan per kapita hanyasanya tumbuh sebesar 0,4 persen pertahun. Sementara pendapatan per kapita di negarayang memiliki institusi yang kuat dan kebijakan ekonomi yang kuat mampu tumbuh 3 persen per tahun. Bukti yang sama juga dijumpai dalam studi yang dilakukan oleh Rodrik (dalam Ikhsan, 1999).

Dalam rangka menjawab permasalahan melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, berikut ini ditawarkan beberapa masukan yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar perancangan sasaran pembangunan nasional khususnya pada agenda keenam.

1. Efisiensi pasar tenaga kerja.

- a. Menyediakan fleksibilitas untuk mengalihkan pekerja dari satu kegiatan ekonomi ke kegiatan lainnya dengan cepat dan dengan biaya rendah

- b. Memastikan standar insentif yang tepat dan tidak tumpang tindih bagi karyawan sebagai upaya mengurangi biaya redudansi yang mahal tanpa mengurangi hak-hak bagi kesejahteraan karyawan.
 - c. Mempromosikan meritokrasi atau penilaian kinerja secara transparan dan adil di tempat kerja sebagai sebuah *nudge* atau pencetus semangat untuk berbuat yang lebih baik dalam rangka mencapai produktivitas karyawan.
 - d. Menyediakan peluang yang sama dan berkeadilan untuk berpartisipasi di lingkungan bisnis antara perempuan dan laki-laki.
- #### 2. Kesiapan teknologi

Institusi diperlukan dalam pembangunan ekonomi mengingat adanya kegagalan pasar sebagai akibat mahalnya informasi dan pelaku pasar tidak menggunakan semua informasi yang diperoleh atau tidak mampu diperoleh atau yang dikenal dengan terminologi “*Bounded Rationality*”. Ketidaktepatan informasi dan keterbatasan dalam kapasitas mengolah informasi akan mempengaruhi biaya transaksi yang mendasari pembentukan institusi. Biaya transaksi muncul akibat informasi mahal dan *asymmetry*, yang bukan hanya untuk menjamin terjadinya transaksi melainkan pula biaya monitoring dan *enforcement costs*. Institusi dikembangkan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pertukaran akan menentukan biaya transaksi yang sejalan dengan teknologi yang digunakan. Pelaku ekonomi yang menguasai informasi dapat dengan mudah merenggut keuntungan karena institusi merupakan *social capital* yang sebagaimana faktor produksi lain seperti modal, tenaga kerja dan teknologi serta *human capital* ikut menentukan tingkat *output* atau kesejahteraan dari suatu negara. (Ikhsan, 1999). Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah :

- a. Tanggap terhadap kecepatan perubahan dan kepekaan terhadap kebutuhan teknologi terkini sebagai dasar kegiatan administrasi publik dalam menunjang pelayanan publik dan sebagai daya tuas dalam mendorong kemajuan kegiatan bisnis dan kehidupan sosial warganegara.
 - b. Membangun infrastruktur teknologi sesuai dengan perkembangannya sebagai basis semua pelayanan publik dan kegiatan bisnis maupun sektor kehidupan lainnya.
 - c. Mengadopsi teknologi yang ada untuk meningkatkan produktivitas industri,
 - d. Memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan sehari-hari dan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi, mendorong produktivitas, dan memungkinkan inovasi.
 - e. Meningkatkan investasi pada teknologi digital yang telah berkembang secara eksponensial untuk diimplementasikan dan dieksplorasi lebih lanjut sebagai upaya meningkatkan efisiensi, baik dalam pemerintahan, perekonomian, maupun sektor kehidupan masyarakat lainnya, dalam rangka perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada warganegara.
3. Infrastruktur
- Solusi kesenjangan infrastruktur yang semakin tinggi akan menuntut pendekatan-pendekatan inovatif, baik untuk mencari pembiayaan tambahan dan untuk menggunakan infrastruktur yang lebih efisien dan lebih cerdas melalui teknologi baru, strategi

manajemen permintaan, perubahan regulasi dan perencanaan harus ditingkatkan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur (panjang jalan) dapat memicu naiknya Gross Domestic Bruto (GDP) di Indonesia. Seiring dengan indeks kebijakan pajak yang baik, seharusnya peningkatan perolehan pajak akan meningkatkan ketersediaan infrastruktur terutama adanya penambahan jalan. (Sembayang, 2011).

- a. Membangun dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi secara efektif - termasuk jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan transportasi udara berkualitas tinggi.
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global.
- c. Meningkatkan tingkat keselamatan dan keamanan transportasi
- d. Melakukan kolaborasi antara sektor publik dan privat dalam rangka menjamin ketersediaan energi dan pasokan listrik yang bebas dari gangguan dan kekurangan sehingga tidak hanya bisnis dan sosial yang dapat bekerja tanpa hambatan, namun juga untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat sebagai pemilik negara.
- e. Melakukan kolaborasi antara sektor publik dan privat secara transparan dan dapat dipercaya (akuntabel) dalam membangun jaringan telekomunikasi yang solid dan luas sehingga memungkinkan arus informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat secara bebas namun terkendali oleh

seluruh warga negara, baik untuk kegiatan bisnis, pelayanan publik, maupun kehidupan sosial sehari-hari.

4. Efisiensi pasar produk
 - a. Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi nasional di pusat dan di daerah.
 - b. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (*starting a business*) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada *Ease of Doing Business (EoDB)*.
 - c. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap Bruto
 - d. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN
 - e. Menurunnya prosentase impor terhadap GDP.Meningkatnya prosentasi ekspor terhadap GDP.
5. Pendidikan dan pelatihan pada pendidikan yang lebih tinggi.
 - a. Membaiknya tingkat partisipasi siswa pada pendidikan menengah dan tinggi
 - b. Membaiknya tingkat partisipasi siswa dan masyarakat pada pelatihan-pelatihan profesi sebagai upaya meningkatkan profesionalitasnya.
6. Kesehatan dan pendidikan dasar
 - a. Turunnya penderita TBC dan dampak kegiatan usaha terkait dengan TBC
 - b. Turunnya dampak kegiatan bisnis terkait dengan HIV/AIDS
 - c. Meningkatnya angka harapan hidup
 - d. Meningkatnya tingkat partisipasi siswa pada pendidikan dasar

C. KESIMPULAN

Cita-cita pembangunan nasional yang menghargai perbedaan dan memberikan peluang partisipasi kepada warganegara, mengiringi prinsip dasar yang kedua dari Trisakti, yaitu berdikari dalam bidang ekonomi, yang diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.

Keberhasilan pembangunan nasional khususnya dalam mewujudkan agenda Nawa Cita keenam yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional harus didukung oleh:

1. Komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah;
3. Keberpihakan kepada rakyat sebagai pemilik negara;
4. Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif
5. Sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan dan akuntabel.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan agenda keenam diantaranya adalah:

1. Meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja.
2. Meningkatkan kesiapan teknologi
3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur
4. Meningkatkan efisiensi pasar produk
5. Meningkatkan partisipasi siswa pada pendidikan menengah dan tinggi
6. Meningkatkan standar kesehatan dan partisipasi siswa pada pendidikan dasar.

REFERENSI

- Ikhsan, Mohamad. 1999. Working Paper I. LPEM, UI.
- Republik Indonesia. 2017. Lampiran Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional,.
- Sembayang, Lesta Karolina B. 2011. Analisis Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Pendekatan Analisis Granger Causality . Jejak, Volume 4, Nomor 1, Maret 2011
- World Economic Forum. 2016. The Global Competitiveness Report 2016-2017.
- World Economic Forum. 2017.The Global Competitiveness Report 2017-2018.
- International Management Development. 2017. World Competitiveness Yearbook